

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang memiliki beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan sebuah usaha dalam rangka meningkatkan serta memperbaiki aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pembangunan nasional yang menjadi fokus utama yaitu pembangunan dalam bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan pemerintah dengan memisahkan antara urusan absolut yang merupakan urusan yang mutlak ditangani oleh pemerintahan pusat, dan urusan konkuren yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mengenai hal tersebut maka urusan ekonomi merupakan urusan konkuren yang dibagi dengan pemerintah daerah yang berarti pemerintah daerah berwenang dalam menangani perekonomian daerahnya masing-masing.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengurus perekonomian daerahnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan menggali potensi daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Potensi yang tersebar di daerah selain berupa potensi alam, ada juga potensi yang berupa sumber daya manusia. Salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat melalui upaya

mengoptimalkan potensi sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga dapat mengurangi beban pemerintah salah satunya adalah beban pengangguran. Upaya pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi adalah dengan memaksimalkan potensi yang terdapat di daerah dengan melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan unit usaha yang banyak dikembangkan di negara berkembang termasuk Indonesia. Negara berkembang tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sektor industri formal. Dengan keadaan tersebut maka sektor UMKM menjadi alternatif yang dapat diandalkan dalam sektor perekonomian di negara berkembang. Dikutip dalam Subiantoro (2019) UMKM tak hanya sebagai penggerak roda perekonomian negara, namun dari segi penyediaan lapangan kerja. UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Menurut Irawan (2018) secara umum, UMKM merupakan jenis usaha dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana, tingkat dan akses terhadap kredit rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Keberadaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan kontribusinya dalam perkembangan perekonomian suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tahun 2004 sebagai tahun *International Microfinance*. Hal tersebut dapat menunjukkan dukungan yang diberikan dunia terhadap adanya UMKM dengan mendorong negara-negara yang ada di seluruh dunia untuk lebih memberikan perhatian pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM antara lain melalui pemberian fasilitas yang sesuai dengan

potensi yang berada di daerah tersebut. Sehubungan dengan langkah PBB menetapkan *International Microfinance*, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tahun 2005 sebagai tahun UMKM Indonesia dengan melakukan berbagai instrumen dan program yang memfasilitasi pemberdayaan UMKM ditingkat nasional yang kemudian diteruskan dengan pemberian fasilitas pengembangan UMKM sesuai dengan potensi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah.

Melihat peran UMKM yang besar dan langkah yang telah ditetapkan oleh PBB, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, serta memberi perlindungan terhadap UMKM dengan menetapkan kebijakan mengenai pencadangan usaha, pendanaan usaha, dan pengembangannya. Kebijakan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada pasal 16 ayat (1) berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang yakni produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi dalam rangka pengembangan UMKM. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat melancarkan pengembangan UMKM di daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dengan difasilitasi dan didukung oleh pemerintah pusat dan daerah.

Keberadaan UMKM dapat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi. Melalui

berita yang dikutip dari *investor.id* Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di daerah. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur bahkan mencapai 57,25%. Dalam rilis pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021, Khofifah menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 7,05%, di mana 59,78% ditopang oleh pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Hal ini berarti UMKM di Jawa Timur memiliki ruang untuk tumbuh dan dikembangkan *market*-nya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Khofifah seperti yang disampaikan dalam *investor.id* :

“Jumlah ini sangat signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Ini artinya UMKM di Jatim memiliki ruang yang luar biasa untuk tumbuh, dikembangkan, dan diluaskan *market*-nya” Kata khofifah dalam pembukaan rangkaian kegiatan gerakan Bangga Buatan Indonesia bertajuk “Lokal Keren Jatim road to Brilian Preneur 2021”, Sabtu (7/8/2021). Dikutip dari berita <https://investor.id/business/258530/umkm-sumbang-5725-dalam-pdrb-jawa-timur> diakses pada 7 September 2021 pukul 17.05 WIB.

Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia adalah potensi dalam sektor perhutanan yang tergolong luas. Dikutip dari CNN Indonesia, luas hutan alam primer di Indonesia adalah 9.638.649 ha pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) 2021 Periode II. Dengan potensi tersebut, pemerintah melihat peluang pengembangan potensi daerah berupa olahan kayu hasil perhutanan Indonesia. Kayu dapat diolah menjadi beberapa barang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga berupa almari, dipan, kursi, dan meja. Selain diolah menjadi barang-barang kebutuhan rumah tangga, kayu juga dapat diolah menjadi alat musik salah satunya gendang. Alat musik gendang merupakan

alat musik pukul yang menjadi instrumen utama pada beberapa jenis musik, khususnya musik yang berasal dari Indonesia.

Alat musik gendang sendiri cukup beragam jenisnya. Biasanya setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam memberi kesan pada kerajinan gendang. Salah satu jenis gendang adalah “Kendang Jimbe”. Menurut (Fernando et al., 2013) “Kendang Jimbe” merupakan alat pukul musik yang biasa digunakan untuk alat musik khas komunitas tertentu (*rege*), acara keagamaan, pendukung alat musik *modern*, sampai sebagai pajangan atau hiasan dalam suatu ruangan. Ciri khas yang paling menonjol dari gendang jenis ini adalah adanya hiasan pada bagian badan gendang. Alat musik “Kendang Jimbe” terbuat dari bahan dasar kayu mahoni, kulit kambing, dan juga tali alpin atau sejenis tali yang digunakan pada olahraga panjat tebing. “Kendang Jimbe” yang tersebar di pasaran juga memiliki beberapa kriteria mulai dari jenis hiasan pada badan gendang hingga ukuran. Jenis hiasan yang terdapat pada badan “Kendang Jimbe” antara lain dibuat dengan cara dilukis atau diukir. Sedangkan ukuran diameter “Kendang Jimbe” yang dijual dipasaran berkisar 20 cm hingga yang 60 cm. Bentuk “Kendang Jimbe” dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
“Kendang Jimbe”



Sumber : dokumentasi penulis, 2022

UMKM “Kendang Jimbe” telah berhasil meraih beberapa prestasi. Dikutip dalam Subiantoro (2019) tercatat pada tahun 2013, UMKM yang bergerak dibidang Usaha Industri Kayu dan Barang Kayu Jadi dari Kota Blitar yaitu UD. Budi Luhur yang merupakan unit usaha yang menekuni bidang “Kendang Jimbe” berhasil masuk ke dalam kategori 10 besar penerima Penghargaan Produktivitas Paramakarya. Dimana Penghargaan Produktivitas Paramakarya tersebut merupakan penghargaan kualitas dan produktivitas tingkat nasional, yang biasa diserahkan kepada presiden berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-04/M Sesneg/ 1/1993 tanggal 8 Januari 1993 tentang Anugrah Produktivitas. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan gairah mengembangkan eksistensi

UMKM dengan menonjolkan potensi daerah masing-masing. Penghargaan Produktivitas Paramakarya diberikan setiap dua tahun sekali dan diselenggarakan setiap tahun ganjil.

Selain itu, pemasaran “Kendang Jimbe” sendiri sudah berhasil menembus pasar lokal dengan pusat penjualan lokal di Pulau Bali. Bali menjadi pusat penjualan lokal karena Bali merupakan lokasi unggulan pariwisata Indonesia sehingga banyak wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing yang berkunjung. Dengan melihat peluang tersebut maka pemasaran “Kendang Jimbe” di Bali menjadi salah satu pilihan pemasaran domestik yang paling diminati oleh pengrajin. Selain pasar lokal, pemasaran “Kendang Jimbe” juga sudah berhasil menembus pasar internasional. Seperti tertera dalam (Subiantoro, 2019) pemasaran “Kendang Jimbe” yang menembus pasar internasional dibuktikan dengan berhasilnya para pelaku usaha memasarkan “Kendang Jimbe” di beberapa Negara di Asia dan Eropa seperti Thailand, Turki, China, Chili, dan Tunisia Setiap minggunya sekitar 20.000 buah “Kendang Jimbe” dihasilkan dan siap didistribusikan ke negara-negara pemesan.

Daerah di Indonesia yang memiliki potensi berupa pengolahan kayu menjadi “Kendang Jimbe” adalah Kota Blitar tepatnya di Kecamatan Kepanjenkidul. “Kendang Jimbe” menjadi salah satu produk unggulan unit UMKM di Kota Blitar. Kota Blitar merupakan kota yang terkenal akan wisata religi karena terdapat Makam Bung Karno sebagai tujuan ziarah, namun selain itu di Kota Blitar masih memiliki banyak daya tarik seperti dari industri makanan hingga kerajinan tangan. Banyak unit usaha yang tumbuh dan berkembang di Kota Blitar

(Disperindag Kota Blitar, 2020). Hal ini menyebabkan banyak sektor UMKM yang turut berkembang dalam masyarakat Kota Blitar. Salah satu sektor UMKM yang berkembang di Kota Blitar adalah industri “Kendang Jimbe”.

Kota Blitar merupakan sebuah kota yang memiliki tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan. Dimana ketiga Kecamatan tersebut memiliki komoditi industri andalan disetiap Kecamatannya. Komoditi industri andalan masing-masing kecamatan di Kota Blitar pada tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1
Industri Komoditi Andalan per Kecamatan 2020

Industri Komoditi Andalan	Kecamatan			Total
	Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
Gendang	-	249	1	245
Bubutan Kayu	1	14	1	16
Sambel Pecel	13	10	6	29
Wajik Kletik	-	3	3	6
Tempe dan Tahu	176	5	8	189
Olahan Belimbing	4	1	1	6
Batik	33	39	14	86
Opak Gambir dan Koyah	30	2	22	54

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa industri gendang didominasi oleh Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah 249 unit dalam kategori industri andalan diantara tiga kecamatan di Kota Blitar. Sedangkan di Kecamatan

Sukorejo yang cukup mendominasi adalah industri tempe dan tahu. Kemudian di Kecamatan Sananwetan industri yang mendominasi merupakan industri bidang makanan berupa opak gambir dan koyah. Sedangkan unit industri lain seperti batik dan sambel pecel hampir merata diseluruh kecamatan di Kota Blitar.

Adapun sesuai dengan data tersebut di Kecamatan Kepanjenkidul memiliki industri *komoditi* andalan yaitu gendang atau lebih tepatnya “Kendang Jimbe”. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul mampu berkreasi dan berinovasi dengan mengolah kayu menjadi sebuah produk yang memiliki kualitas unggul dan ciri khas sehingga mampu menjadi produk unggulan dari Kota Blitar yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu menembus pasar lokal maupun internasional. Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul sudah dapat melihat potensi yang ada sehingga dapat dikembangkan dan menjadi *komoditi* andalan di kecamatan tersebut.

Prestasi lain yang diraih oleh “Kendang Jimbe” dari Kecamatan Kepanjenkidul ini adalah keberhasilannya dalam menyerap tenaga kerja. Dikutip dalam (Irawan, 2018) industri dibidang kerajinan “Kendang Jimbe” ini paling banyak adalah *home industry* sehingga meningkatkan produktivitas masyarakatnya serta menyerap tenaga kerja. Dengan tingginya angka permintaan pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri, maka pelaku usaha tentu membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang diserap dalam sektor UMKM “Kendang Jimbe” ini merupakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga dan warga sekitar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Blitar khususnya di Kecamatan Kepanjenkidul. Hal tersebut juga didukung oleh data serapan tenaga kerja di unit

industri olahan kayu, bambu dan peralatan rumah tangga yang didalamnya termasuk industri “Kendang Jimbe”. Data serapan tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Industri Kecil Menengah
Menurut Sub Sektor dan Tenaga Kerja di Kota Blitar
Tahun 2020

Subsektor	Tahun	Unit Industri	Jumlah Tenaga Kerja
Industri Kayu, Bambu, dan Peralatan Rumah Tangga	2020	591	1.476
	2019	4.844	14.021
	2018	4.811	13.763
	2017	4.780	12.435

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja pada sub sektor industri kayu, bambu, dan peralatan rumah tangga pada tahun 2020 mencapai angka 1.476 tenaga kerja melalui 591 unit usaha. Penyerapan tenaga kerja ini dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah karena daerah tersebut dapat melihat dan memanfaatkan potensi daerah dengan maksimal sehingga dapat menekan dan mengendalikan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan “Kendang Jimbe” yang memiliki banyak prestasi berhasil membuktikan bahwa Kota Blitar memiliki potensi lokal yang berkualitas di bidang olahan kayu. Hingga saat ini “Kendang Jimbe” berhasil menjadi produk unggulan dan ikon Kota Blitar. Produk asli yang lahir dari daerah tersebut telah memberikan kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi daerah tersebut. UMKM tersebut telah

mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi daerah tersebut sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Mengingat peran UMKM sebagai penggerak perekonomian negara dan daerah sangat besar. Maka pengembangan UMKM di setiap daerah perlu diperhatikan secara serius. Hal ini dikarenakan UMKM berkembang dari masyarakat daerah yang paham akan potensi daerahnya masing-masing serta secara langsung memberi dampak pada sosial budaya lingkungan daerah tersebut. Setiap daerah harus memiliki peran yang optimal untuk mendukung berkembangnya UMKM dengan menonjolkan potensi lokal yang kaya. Keberadaan peran yang optimal tersebut akan potensi produk lokal daerah dapat bersaing di pasar global maupun pasar internasional.

Berkembangnya UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Kota Blitar. Peran dari Pemerintah Daerah Kota Blitar sangat berpengaruh dalam berkembangnya UMKM “Kendang Jimbe” ini. Adapun dalam pengembangan UMKM “Kendang Jimbe” ini peran Pemerintah Daerah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja pada Pasal 3 yang berbunyi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Guna melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi, UKM, dan

Tenaga Kerja menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro serta pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro. Berbicara mengenai peran pemerintah, Siagian (2018) menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan nasional yang didalamnya termasuk pula pembangunan ekonomi adalah peran sebagai stabilisator, peran inovator peran modernisator, dan peran pelopor. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja terus melakukan upaya secara maksimal dalam pengembangan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar agar semakin menunjukkan eksistensi UMKM dan semakin mendapat tempat di masyarakat.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap **Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja dalam Pengembangan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ditemukan, penelitian ini memiliki batasan berupa rumusan masalah yaitu **Bagaimana Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.**

1.3 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisa peran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ada pada penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja dalam pengembangan UMKM yang ada di Kota Blitar khususnya UMKM “Kendang Jimbe” pada lingkup Administrasi Publik dan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian selanjutnya dengan fokus serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja dalam pengembangan UMKM di Kota Blitar khususnya UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar sebagai tambahan informasi dan sebagai masukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja untuk pengembangan UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe”.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Jawa Timur”

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan fokus yang serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu dan memperbanyak referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Administrasi Publik.